



Optimalisasi Tata Kelola Kelembagaan UMKM Sagu dalam Membangun Ekosistem Ekonomi Mandiri di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, Tidore Kepulauan

Optimizing the Institutional Governance of Sago MSMEs to Build a Self-Reliant Economic Ecosystem in Guraping Urban Village, North Oba District, Tidore Islands

Johan Fahri¹, Musdar Muhammad^{2*}, Rizki Wahyu Utami Ohorella³

¹Program Studi Manajemen, Ekonomi & Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

²Prodi Ekonomi Pembangunan, Ekonomi & Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

³Prodi Akuntansi, Ekonomi & Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

*Penulis Korespondensi: musdar@unkhaair.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 10 Juli 2026;

Revisi: 15 Agustus 2026;

Diterima: 31 Agustus 2026;

Terbit: 08 September 2026;

Keywords: Business Accounting; Guraping; MSME Institutional Framework; Sago; Technology Application.

Abstract. *Guraping Village has significant potential for sago commodities as a traditional food source and local economic driver; however, its management remains individual, traditional, and institutionally weak. This community service project aims to optimize the institutional governance of sago MSMEs through organizational strengthening, human resource capacity building, application of appropriate technology, and partnership networking to build an independent economic ecosystem in Guraping Village, Oba Utara District, Tidore Islands City. The participatory method consisted of four integrated stages: socialization, management and financial bookkeeping training, production technology application (distribution of grating machines, fornos, and jacks), and continuous mentoring and evaluation involving 32 sago MSME actors in 2026. The results indicated an increase in active participation from 24 to 32 actors. Establishing an SOP-based group institutional structure and structured financial recording effectively mitigated sectoral ego issues and improved accessibility to formal banking (bankability). Technology application reduced processing time, boosted production output, and ensured product hygiene and quality consistency. Institutional optimization combined with pentahelix synergy successfully transformed traditional household-based sago MSMEs into competitive, digitally-oriented, and sustainable business units that strengthen local food security.*

Abstrak.

Kelurahan Guraping memiliki potensi besar komoditas sagu sebagai sumber pangan tradisional dan penggerak ekonomi lokal, namun pengelolaannya masih bersifat individual, tradisional, serta lemah secara kelembagaan dan manajerial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola kelembagaan UMKM sagu melalui penguatan organisasi, peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi tepat guna, dan perintisan jejaring kemitraan guna membangun ekosistem ekonomi mandiri di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui empat tahapan terintegrasi: sosialisasi, pelatihan manajemen dan pembukuan keuangan, penerapan teknologi produksi (penyerahan mesin parut, *forno*, dan dongkrak), serta pendampingan dan evaluasi berkelanjutan dengan mitra sasaran sebanyak 32 pelaku UMKM sagu pada tahun 2026. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi aktif pelaku usaha dari 24 orang menjadi 32 orang. Pembentukan struktur kelembagaan kelompok berbasis SOP dan pencatatan keuangan terstruktur mampu meminimalkan kendala ego sektoral serta meningkatkan aksesibilitas permohonan modal perbankan (*bankability*). Penerapan teknologi produksi berhasil meningkatkan efisiensi waktu, kuantitas, higienitas, dan mutu produk. Optimalisasi kelembagaan berbasis sinergi *pentahelix* terbukti efektif mentransformasi UMKM sagu rumah tangga tradisional menjadi unit usaha yang tertata, berdaya saing, berorientasi pasar digital, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

Kata Kunci: Akuntansi Usaha; Guraping; Kerangka Kelembagaan UMKM; Sagu; Teknologi Tepat Guna.

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Guraping merupakan salah satu kelurahan di wilayah pesisir dan dataran rendah Kecamatan Oba Utara, Tidore Kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam lokal berupa tanaman sagu (*Metroxylon sagu*) sebagai pangan tradisional dan sumber penghidupan masyarakat. Secara sosial-ekonomi, sebagian besar masyarakat Guraping bermata pencaharian sebagai petani sagu, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang mengolah sagu menjadi produk pangan sederhana seperti sagu basah, sagu lempeng, sagu tumang, dan olahan rumah tangga lainnya. Aktivitas UMKM sagu di wilayah ini tumbuh secara turun-temurun dan berbasis kearifan lokal, namun belum dikelola secara profesional dan berorientasi pasar.

Kelurahan Guraping merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan dengan luas wilayah 85 Km². Secara geografis Kelurahan Guraping terletak antara 0o 50'LS dan 0o 20'LU, 127o 30'BT, dengan batas-batas wilayah sebelah utara laut, sebelah selatan hutan, sebelah timur desa gosale, sebelah barat Desa Galala. Di Kelurahan Guraping terdapat 3 dusun yaitu dusun sukma, dusun rabadof, dusun talangme, terdiri atas 14 RT dan 6 RW. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Guraping berjumlah 1.738 jiwa dimana jumlah laki-laki adalah 904 orang dan jumlah perempuan 834 orang. Masyarakat kelurahan Guraping merupakan Masyarakat yang multi etnis, namun Masyarakat kelurahan Guraping merupakan Masyarakat etnis Tidore dengan yang digunakan hari-hari menggunakan Bahasa Tidore.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, baik dari sisi ketersediaan, kualitas, kelayakan, keragaman, dan kecukupan gizinya secara berkelanjutan [2]. Untuk itu diperlukan kelembagaan yang kuat untuk menangani bidang pangan. Dalam peraturan perundangan pangan pun telah menyebutkan perlunya dibentuk suatu kelembagaan pangan yang memiliki cakupan kewenangan yang luas, hanya saja sampai sekarang kelembagaan yang dimaksud tak kunjung terbentuk. perlunya strategi penguatan peran kelembagaan pangan, yaitu: Harmonisasi Kebijakan dan Perencanaan Program antar Kelembagaan Pangan; Optimalisasi Sumber Daya; Penguatan Implementasi Program; Evaluasi dan Monitoring untuk perbaikan selanjutnya

Dari sisi wilayah, Kelurahan Guraping memiliki akses yang relatif dekat dengan pusat kecamatan dan jalur distribusi menuju Kota Tidore Kepulauan serta Kota Ternate. Kondisi ini seharusnya menjadi peluang bagi pengembangan UMKM sagu untuk memperluas jangkauan pasar [4]. Namun, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan manajerial menyebabkan potensi geografis tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Dari sisi masyarakat, pelaku UMKM

sagu umumnya menjalankan usaha secara individual atau kelompok informal tanpa struktur organisasi yang jelas, tanpa pembagian peran, serta tanpa sistem administrasi dan pencatatan keuangan yang tertata.

Berdasarkan kondisi eksisting mitra, permasalahan utama UMKM sagu di Kelurahan Guraping dapat dianalisis secara hulu–hilir. Pada sisi hulu, ketersediaan bahan baku sagu relatif mencukupi, namun pengelolaan kebun sagu masih bersifat tradisional, belum terintegrasi dalam perencanaan produksi, dan belum memiliki kepastian pasokan berkelanjutan berbasis kelompok atau kelembagaan. Pada sisi proses produksi, pengolahan sagu masih menggunakan peralatan sederhana, belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), serta belum memperhatikan aspek efisiensi, sanitasi, dan konsistensi mutu produk. Hal ini berdampak pada kualitas produk yang tidak seragam dan sulit bersaing dengan produk pangan lain.

Pada sisi hilir, permasalahan semakin kompleks. Produk sagu yang dihasilkan sebagian besar dijual dalam bentuk bahan mentah atau olahan sederhana dengan nilai tambah rendah. Sistem pemasaran masih terbatas pada pasar lokal, penjualan langsung, dan jaringan informal. Pelaku UMKM belum memiliki identitas usaha, kemasan yang menarik, perizinan dasar, maupun akses ke jejaring pemasaran yang lebih luas. Selain itu, lemahnya tata kelola kelembagaan menyebabkan UMKM sagu belum mampu membangun kerja sama antar pelaku usaha, belum terhubung dengan program pemerintah, serta belum menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang terintegrasi.

Secara terkuantifikasi, kondisi ini tercermin dari rendahnya skala produksi, terbatasnya omzet usaha, dan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal dari sektor UMKM sagu. Dengan demikian, permasalahan mitra tidak hanya bersifat teknis produksi, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, manajemen usaha, dan ekosistem ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan intervensi program pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada optimalisasi tata kelola kelembagaan UMKM sagu sebagai fondasi utama untuk membangun ekosistem ekonomi mandiri di Kelurahan Guraping.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola kelembagaan UMKM sagu di Kelurahan Guraping melalui penguatan organisasi, peningkatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan, penyusunan SOP usaha, serta fasilitasi jejaring kemitraan. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk mendorong UMKM sagu agar mampu bertransformasi dari usaha tradisional berbasis rumah tangga menjadi unit usaha yang tertata, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam kerangka ekosistem ekonomi lokal.

Mitra sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah pelaku UMKM sagu di Kelurahan Guraping yang termasuk dalam kategori masyarakat produktif secara ekonomi. Berdasarkan hasil diskusi awal, observasi lapangan, dan kesepakatan bersama mitra, ditetapkan bahwa permasalahan prioritas yang akan ditangani mencakup dua bidang utama, yaitu manajemen usaha (kelembagaan) dan pemasaran (hilir usaha).

Kegiatan pengabdian ini merupakan lanjutan kegiatan pengabdian dibuat sudah beberapa kali terkait dengan UKM sagu di kelurahan Guaraping, kenapa harus dilakukan Kembali dilokasi Guruaping dikarenakan, pengelolaan pada produksi masih bersifat individu atau keluarga, sudah terdapat kelompok/lembaga, namun pada pengelolaan untuk menjalankan kelompok/lembaga terkendala, dikarenakan masih terdapat ego-ego, selain itu juga sumber daya manusia pada pengelolaan kelompok/lembaga masih sangat minim, sehingga peningkatan produksi pada pembuatan sagu tidak dicatat untuk melihat berapa jumlah produksi yang dilakukan, dan berapa banyak bahan produksi dilakukan, Lembaga/kelompok tidak berjalan secara efektif terdapat kendala untuk mengakses modal dipihak perbankan tidak teakses, untuk modal produksi dilakukan dengan mengadakan modal dari keluarga, untuk membuat sagu. Terdapat kekurangan alat produksi untuk meningkatkan produksi berupa mesin parut, forno, ember Bascom, dan dongkrot yang sangat dibutuhka untuk meningkatkan produksi.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh solusi yang ditawarkan dapat diimplementasikan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan mitra sasaran, yaitu pelaku UMKM sagu di Kelurahan Guraping. Metode pelaksanaan difokuskan pada mitra produktif secara ekonomi, dengan penanganan utama pada bidang manajemen usaha (kelembagaan) dan bidang pemasaran (hilir usaha). metode tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Sosialisasi , Pelatihan, Penerapan teknologi, Pendampingan dan evaluasi

3. HASIL

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disiapkan oleh tim PKM; persiapan administrasi sampai pada komunikasi dengan pemerintah keluraahan Guruaping dan ibu-ibu pembuat sagu yang ada di kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

Gambar 1. Persiapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kelurahan Guraping.



Sumber; Dokumentasi Tim PKM 2026.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di kelurahan Guraping dengan target kegiatan pengabdian, dilakukan selama ini secara berjenjang, dengan targetnya kepada pelaku pembuat sagu yang ada di kelurahan Guraping, sebanyak 24 orang, namun di tahun 2026 terjadi peningkatan pembuatan sagu, sebanyak 32 orang, hal ini bisa dilihat bahwa sagu memberikan prospek ekonomi yang bagus jika dikembangkan secara terus menerus di kalangan masyarakat.

Gambar 2. Penyerahan Mesin Produksi.



Sumber: Dokumentasi PKM 2026.

4. DISKUSI

Pengembangan pangan lokal berbasis ubi kayu atau singkong yang diolah menjadi sagu lempeng di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, memegang

peranan strategis dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjadi alternatif substitusi beras (Fahri & Muhammad, 2021). Komoditas ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan karbohidrat harian, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi domestik yang besar apabila dikelola secara profesional dan terencana (Sanaba, 2024; Hidayanti et al., 2025). Keberadaan puluhan pengrajin sagu di wilayah Guraping menunjukkan bahwa sektor ini telah menjadi salah satu tumpuan hidup utama bagi masyarakat setempat secara turun-temurun (Latupapua & Soselisa, 2022; Fahri et al., 2024). Namun demikian, pemanfaatan potensi ekonomi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang menghalangi terciptanya kemandirian ekonomi yang solid (Fahri et al., 2025).

Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan PKM 2026 di Kelurahan Guraping.



Sumber: Dokumentasi PKM 2026.

Berdasarkan hasil temuan lapang, akar permasalahan utama pengolahan sagu di Kelurahan Guraping terletak pada pola produksi dan tata kelola yang masih bersifat parsial, perorangan, serta berbasis ikatan keluarga semata (Fahri et al., 2024). Ketidakadaan kelembagaan usaha yang formal atau wadah koperasi membuat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bekerja secara terisolasi tanpa adanya koordinasi kolektif dalam pengadaan bahan baku, penetapan standar harga, maupun strategi pemasaran (Muhammad et al., 2022; Fahri et al., 2025). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan lahan budidaya mandiri yang mewajibkan pengrajin mendatangkan singkong dari wilayah luar seperti Jailolo dan Tobelo, sehingga biaya operasional membengkak dan kontinuitas produksi terganggu (Fahri & Muhammad, 2021).

Gagasan mengenai optimalisasi tata kelola kelembagaan UMKM sagu menjadi jawaban konkret atas urgensi transformasi usaha mikro konvensional menuju bentuk kelompok usaha yang terstruktur dan legal (Fahri et al., 2025). Kelembagaan usaha berfungsi sebagai

instrumen tata kelola yang mengintervensi alokasi sumber daya, efisiensi rantai pasok, serta perlindungan bagi para produsen lokal (Aziza, 2019; Fahri et al., 2025). Pembentukan kelompok kerja atau koperasi UMKM sagu yang solid di Guraping diproyeksikan mampu menyatukan potensi individu ke dalam kekuatan ekonomi kolektif yang berdaya saing tinggi (Fahri et al., 2025). Dengan kelembagaan yang tertata, tata kelola bisnis dapat dijalankan berlandaskan prinsip transparansi, pembagian kerja yang jelas, serta akuntabilitas finansial (Pangestuti et al., 2024; Fahri et al., 2025).

Dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat terdapat temuan yang sangat erat dan saling menguatkan (Fahri et al., 2025). Temuan empiris mengonfirmasi bahwa kendala teknis, seperti proses pengeringan yang bergantung pada cuaca, peralatan yang masih tradisional, serta rantai penjualan melalui tengkulak merupakan dampak langsung dari ketiadaan tata kelola kelembagaan yang terorganisir (Fahri et al., 2024). Oleh karena itu, usulan optimalisasi kelembagaan secara langsung menasar titik nadir permasalahan tersebut dengan menawarkan solusi integratif berupa pelebagaan kelompok usaha guna mengentaskan isolasi teknologi dan stagnasi skala produksi (Fahri et al., 2025).

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar inti dalam optimalisasi tata kelola kelembagaan UMKM sagu Guraping (Satriawan, 2025; Fahri et al., 2025). Penguatan manajemen kelembagaan mencakup pemberian literasi manajerial dasar, pembukuan keuangan yang tertib, serta pencatatan biaya produksi secara efisien (Apituley et al., 2023; Fahri et al., 2025). Selama ini, ketidakmampuan pelaku usaha dalam mencatat arus kas dan mengkalkulasi overhead menjadi penyebab utama kegagalan mereka dalam mengakses pembiayaan formal dari lembaga perbankan (Eko et al., 2021; Alhadar et al., 2025). Dengan tata kelola keuangan yang rapi melalui wadah kelembagaan, aksesibilitas terhadap modal dan bantuan program pemerintah dapat terbuka lebih luas (Nuraini & Abdullah, 2023; Fahri et al., 2025).

Di samping pengelolaan internal, kelembagaan yang optimal memegang peran vital dalam memfasilitasi adopsi teknologi dan inovasi proses produksi sagu (Cornellia & Saptoto, 2025; Fahri et al., 2025). Ketergantungan pada sinar matahari yang menyebabkan terhentinya produksi saat musim hujan dapat diatasi apabila kelompok usaha secara kolektif mengelola mesin pengering atau oven buatan (Fahri et al., 2024). Modernisasi peralatan produksi seperti mesin pamarut mekanis dan alat pemeras otomatis tidak hanya memangkas durasi kerja yang sebelumnya memakan waktu hingga belasan jam, tetapi juga meningkatkan kuantitas dan kebersihan hasil olahan secara konsisten (Fahri et al., 2024; Fahri et al., 2025).

Aspek hilir dari tata kelola kelembagaan berfokus pada diferensiasi produk dan penetrasi pasar digital yang berkelanjutan (Renita et al., 2022; Hidayanti et al., 2025). Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemasaran sagu di Guraping masih terjebak pada metode konvensional berbasis pesanan lokal dan penjualan pasar tradisional (Renita et al., 2022; Hidayanti et al., 2025). Melalui wadah kelembagaan UMKM, para pengrajin dapat dilatih untuk melakukan diversifikasi produk menjadi olahan turunan seperti bagea, biskuit, dan cookies sagu, lengkap dengan pengemasan menarik dan sertifikasi PIRT (Saputra et al., 2022; Hafel et al., 2020; Hidayanti et al., 2025). Penggunaan e-commerce serta media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok di bawah naungan merek kolektif akan memperluas daya saing produk hingga ke luar daerah (Indarto et al., 2023; Hidayanti et al., 2025).

Optimalisasi kelembagaan juga berkontribusi nyata dalam menumbuhkan motivasi, etos kerja, serta semangat berwirausaha di kalangan pelaku UMKM (Novita, 2025; Alhadar et al., 2025). Hambatan psikososial seperti ego sektoral antarprodusen dan rendahnya kepercayaan diri dapat diredam melalui iklim kolaborasi yang suportif dalam struktur kelembagaan (Alhadar et al., 2025). Keberadaan wadah kelompok yang terarah memberikan dorongan moral dan kepastian usaha, sehingga para produsen sagu memiliki komitmen tinggi, kemandirian, serta keberanian dalam mengambil risiko bisnis yang terukur (Giacomin et al., 2023; Badawi, 2023; Alhadar et al., 2025).

Pembangunan ekosistem ekonomi mandiri di Kelurahan Guraping membutuhkan sinergi multi-pihak (*pentahelix*) yang dimotori oleh kelembagaan UMKM yang kuat (Nursalam et al., 2023; Hidayanti et al., 2025). Kolaborasi aktif antara akademisi perguruan tinggi sebagai pendamping, pemerintah daerah sebagai penyedia regulasi, pemuda Karang Taruna sebagai penggerak operasional, serta pelaku usaha sebagai eksekutor utama menjadi fondasi terciptanya ekosistem usaha yang kondusif (Hafel et al., 2020; Fahri et al., 2025). Kelembagaan yang terstruktur secara legal menjadi pintu masuk utama bagi pengintegrasian berbagai program pemberdayaan dan bantuan fasilitas secara tepat sasaran (Fathan, 2024; Fahri et al., 2025).

Secara keseluruhan, optimalisasi tata kelola kelembagaan UMKM sagu terbukti menjadi kunci linier dalam mentransformasi potensi komoditas lokal menjadi penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan di Kelurahan Guraping (Fahri et al., 2025). Integrasi antara penguatan kapasitas SDM, modernisasi teknologi produksi, diversifikasi produk, dan perluasan pemasaran digital di bawah kelembagaan yang kokoh akan menjamin peningkatan pendapatan serta kesejahteraan rumah tangga pembuat sagu (Hidayanti et al., 2025; Fahri et al., 2025). Pada akhirnya, terwujudnya kelembagaan UMKM sagu yang mandiri tidak hanya memperkuat

ketahanan pangan lokal di Kecamatan Oba Utara, melainkan juga menstimulasi terciptanya ekosistem ekonomi lokal yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan (Saleh, 2024; Fahri et al., 2025)

5. KESIMPULAN

Keterbatasan tata kelola organisasi, lemahnya literasi keuangan, ego sektoral, serta ketergantungan pada alat produksi tradisional dan modal keluarga menjadi penghambat utama pengembangan UMKM sagu dari hulu ke hilir. Program pengabdian dilaksanakan secara partisipatif melalui empat tahapan terintegrasi: sosialisasi, pelatihan manajemen dan pembukuan, penerapan teknologi produksi (penyerahan mesin pamarut, *forno*, dan dongkrak), serta pendampingan dan evaluasi berkelanjutan.

Terjadi peningkatan partisipasi aktif pelaku usaha dari 24 orang menjadi 32 orang pada tahun 2026. Intervensi teknologi dan kelembagaan berhasil meningkatkan efisiensi waktu, kuantitas, dan higienitas produksi, sekaligus membentuk struktur organisasi kelompok yang transparan dan berbasis SOP. Penguatan kelembagaan berbasis *pentahelix* menjadi pilar kunci dalam meningkatkan aksesibilitas permodalan formal (*bankability*), memperluas jangkauan pasar digital, mendorong diversifikasi produk bertambah nilai (PIRT), serta memperkuat ketahanan pangan dan ekosistem ekonomi mandiri di Kecamatan Oba Utara.

DAFTAR REFERENSI

- Alhadar, A., et al. (2025). Penguatan motivasi dan kapasitas pelaku UMKM pangan lokal. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Apituley, F., et al. (2023). Manajemen keuangan dan pembukuan sederhana bagi pelaku usaha kecil. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro*.
- Aziza, T. N. (2019). Upaya penguatan kelembagaan pangan. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(1), 204–217.
- Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan. (2021). *Kecamatan Oba Utara dalam angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan.
- Badawi, A. (2023). Kewirausahaan dan profil motivasi pelaku usaha mikro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Cornellia, R., & Saptoto, R. (2025). Inovasi teknologi dan adopsi mesin pengolahan pangan tradisional. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*.
- Eko, P., et al. (2021). Akses pembiayaan perbankan bagi usaha mikro di wilayah kepulauan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Fahri, A., & Muhammad, R. (2021). Potensi singkong dan sagu lempeng sebagai alternatif ketahanan pangan di Guraping, Oba Utara. *Jurnal Ilmiah Pangan dan Pertanian*.

- Fahri, A., et al. (2024). Identifikasi kendala tata kelola dan produksi industri sagu tradisional di Kelurahan Guraping. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*.
- Fahri, A., et al. (2025). Optimalisasi tata kelola kelembagaan UMKM sagu lempeng berbasis pangan lokal di Kelurahan Guraping Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Pembangunan Desa*.
- Giacomin, O., et al. (2023). Entrepreneurial intentions and risk perception in micro-enterprises. *Journal of Small Business and Enterprise Development*.
- Hafel, M., et al. (2020). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan produk turunan sagu. *Jurnal Pengabdian Sosial dan Komunitas*.
- Hidayanti, N., et al. (2025). Strategi pemasaran digital dan diversifikasi produk pangan lokal sagu di Maluku Utara. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*.
- Hidayat, S., Yulianti, L. N., & Simanjuntak, M. (2021). Financial literacy and MSME performance in developing regions. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 857–865.
- Indarto, B., et al. (2023). Pemanfaatan e-commerce dan media sosial untuk perluasan pasar produk UMKM. *Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Digital*.
- Kadir, A., Surya, B., & Ahmad, A. (2021). Strengthening MSME institutional capacity for local economic development. *International Journal of Entrepreneurship*, 25(4), 1–10.
- Latupapua, R., & Soselisa, H. (2022). Ketergantungan sosial ekonomi masyarakat terhadap komoditas sagu tradisional. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*.
- Muhammad, R., et al. (2022). Rantai pasok dan kelembagaan usaha mikro pangan tradisional. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*.
- Novita, S. (2025). Pengaruh budaya kerja dan motivasi usaha terhadap kinerja pelaku UMKM. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*.
- Nugroho, R., & Pramono, S. E. (2022). Digital marketing adoption for rural MSMEs. *Heliyon*, 8(6), e09605.
- Nuraini, L., & Abdullah, F. (2023). Transparansi dan aksesibilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM. *Jurnal Keuangan Publik*.
- Nursalam, A., et al. (2023). Model kolaborasi pentahelix dalam peningkatan ekonomi kreatif berbasis komoditas lokal. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*.
- Pangestuti, D., et al. (2024). Penerapan tata kelola bisnis usaha mikro yang akuntabel. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Pratama, A. R., Siregar, H., & Daryanto, A. (2023). Sustainable MSME development through institutional approach. *Sustainability*, 15(5), 4210.
- Rahmawati, R., & Fitriani, R. (2021). Penguatan tata kelola UMKM berbasis pangan lokal melalui pendampingan masyarakat. *Jurnal Abdimas*, 25(3), 210–219.
- Rauf, A., Lestari, D. A., & Santoso, H. (2020). Value chain analysis of sago-based agroindustry in eastern Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 411, 012042.
- Renita, M., et al. (2022). Analisis pemasaran konvensional dan kendala penetrasi pasar pangan lokal. *Jurnal Agribisnis Indonesia*.

- Saleh, M. (2024). Pengembangan ekosistem ekonomi lokal berkelanjutan di wilayah kepulauan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah*.
- Sanaba, H. (2024). Potensi ekonomi domestik komoditas ubi kayu dan sagu lempeng. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*.
- Saputra, A., et al. (2022). Diversifikasi produk olahan sagu dan sertifikasi PIRT untuk usaha mikro. *Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi*.
- Satriawan, B. (2025). Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM wilayah pesisir. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Suryana, A., & Rachman, H. P. (2020). Local food development strategy to support food security in Indonesia. *Food Policy*, 91, 101834. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101834>
- Susanti, E., Hubeis, M., & Hardinsyah. (2020). Institutional strengthening model for food-based MSMEs. *International Journal of Social Economics*, 47(9), 1171–1186.
- Tambunan, T. (2019). MSMEs in Indonesia: Challenges and development strategies. *Asian Journal of Business and Accounting*, 12(1), 1–31.
- Widiastuti, T., Handayani, B. R., & Mulyani, S. (2022). Pemberdayaan UMKM pangan lokal berbasis kelembagaan desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 145–156.
- Yusuf, M., Arsyad, M., & Amiruddin, A. (2021). Community-based entrepreneurship and local economic resilience. *Journal of Enterprising Communities*, 15(4), 605–622.